

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2020-2022

Kuni Kurniawati¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 25, 2024
Revised November 25, 2024
Accepted November 30, 2024

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan,
Kemandirian,
Ketergantungan,
Efektivitas,
Desentralisasi,
Efisiensi.

Keywords:

*Financial Performance,
Independence,
Dependence,
Effectiveness,
Decentralization,
Efficiency.*

ABSTRAK

Setiap daerah di Indonesia mempunyai suatu kewenangan untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengerahui kinerja keuangan yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio efisiensi belanja daerah di kawasan Barlingmascakeb atau yang memiliki kepanjangan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen pada tahun 2020-2022. Adapun hasil penelitian ini, yaitu rasio kemandirian keuangannya masih rendah sekali dan secara umum pada tahun 2020-2022 memiliki pola hubungan instruktif, Hasil rasio ketergantungan keuangan daerahnya, yaitu Sebagian besar >50% artinya kabupaten atau daerah tersebut memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, Secara umum nilai rasio efektivitas pendapatan asli daerahnya cukup efektif dan sangat efektif. Hasil rasio derajat desentralisasinya pada kisaran 10% hingga 25% atau kurang baik. Kemudian, hasil dari rasio efisiensi secara umum untuk kawasan Balingmascakeb pada tahun 2020 hingga 2022 berada pada kisaran 80%-90% dan 90%-100% atau cukup efisien dan kurang efisien.

ABSTRACT

Each region in Indonesia has the authority to manage its own regional finances. This research aims to determine the financial performance, which includes the regional financial independence ratio, regional financial dependency ratio, regional original revenue effectiveness ratio, degree of decentralization ratio, and regional expenditure efficiency ratio in the Barlingmascakeb area, which stands for Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, and Kebumen, during the years 2020-2022. The results of this study indicate that the financial independence ratio is still very low and generally shows an instructive relationship pattern from 2020 to 2022. The regional financial dependency ratio shows that most areas have a dependency level of over 50%, meaning these districts or regions have very high dependency. Generally, the effectiveness ratio of local original revenue is quite effective and very effective. The degree of decentralization ratio ranges from 10% to 25%, which is considered less favorable. Then, the results of the efficiency ratio in general for the Balingmascakeb area from 2020 to 2022 were in the range of 80%-90% and 90%-100%, or quite efficient and less efficient.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Kuni Kurniawati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Indonesia
Email: kunikurniawati08@student.uns.ac.id

1. PENDAHULUAN

Salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari berbagai daerah adalah Indonesia, dengan jumlah provinsi hingga saat ini ada 38 provinsi. Setiap pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten, kota, atau lainnya di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan adanya otonomi daerah. Jadi, otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban pada tiap daerah agar dapat melakukan beragam kegiatan pemerintahannya secara lebih mandiri atau menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban [1]. Penerapan otonomi daerah ini dimulai setelah terjadinya reformasi tepatnya tahun 1998. Pada bidang ekonomi, otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan bahwa setiap pemerintah diberikan kebebasan dalam hal mengelola keuangannya agar tercapai pemerataan pendapatan [2].

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya terdapat dalam pasal 3, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau biasa disingkat APBD. Proses dari pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan atau penyusunan APBD yang dilakukan oleh setiap daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut tentunya memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk dapat memberikan nilai terkait akuntabilitas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan yang lebih baik [3]. Dengan adanya pengukuran kinerja keuangan maka akan dapat digunakan untuk membantu dalam hal memperbaiki kinerja pemerintah daerah [4]. Pengukuran kinerja keuangan tersebut digambarkan dalam rasio keuangan yang dihasilkan dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah yakni perhitungan APBD.

Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen yang biasa disebut dengan kawasan Barlingmascakeb merupakan objek penelitian pada penelitian ini. Kawasan tersebut berada di provinsi Jawa Tengah. Sama halnya dengan kabupaten-kabupaten atau daerah lain di Indonesia, kabupaten yang ada di dalam kawasan Barlingmascakeb juga diberikan kewenangan yang sama dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengenai pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan pada daerah masing-masing. Jadi, penelitian ini akan membahas mengenai analisis kinerja keuangan daerah pada kawasan Barlingmascakeb untuk periode tahun 2020 hingga 2022.

2. METODE

2.1 Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif menurut Sugiyono dalam [1] didefinisikan sebagai penelitian yang didalamnya menggambarkan mengenai fenomena atau ciri data yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan atau dalam jangka waktu tertentu untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian tersebut. Jadi penelitian ini akan membahas mengenai kinerja keuangan daerah yang ada di kawasan Barlingmascakeb dari tahun 2020 hingga 2022.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini merupakan data sekunder. Pengertian dari data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari pihak lain yang mana data tersebut sudah diolah terlebih dahulu (Liando et al., 2014). Data tersebut bersumber dari website resmi Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mana data tersebut dapat diakses pada link berikut djpk.kemenkeu.go.id.

2.3 Teknik Analisis Data

2.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian merupakan rasio yang mengukur kemampuan dari pemerintah daerah untuk mendanai aktivitas yang dilakukannya [5]. Berikut merupakan rumus perhitungannya:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Realisasi Transfer Pusat+Daerah+Pinjaman}} \times 100 \%$$

Tabel 1. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Keuangan (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Keterangan:

- 1) Instruktif: Peran dari pemerintah pusat lebih banyak dibandingkan kemandirian pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini daerah tidak dapat melaksanakan otonomi.
- 2) Konsultatif: Peran dari pemerintah pusat mulai berkurang hal tersebut dikarenakan daerah tersebut dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi.
- 3) Partisipatif: Peran dari pemerintah pusat sudah mulai lebih berkurang karena daerah menjadi lebih mandiri.
- 4) Delegatif: Peran dari pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah sudah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah [6].

2.3.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan rasio yang perhitungannya, yaitu perbandingan dari total dari pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah yang ada [7]. Semakin tinggi hasil rasio ini, maka akan semakin besar juga tingkat dari ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Adapun rumus yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 2. Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

2.3.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa dikenal PAD adalah rasio yang menjelaskan mengenai tingkat kemampuan dari pemerintah daerah dalam hal mewujudkan PAD yang sudah direncanakan sebelumnya lalu dibandingkan dengan target atau anggaran yang sudah ditetapkan berdasarkan pada potensi nyata daerah [8]. Daerah tersebut dikatakan efektif jika rasio yang didapatkan mencapai minimal sebesar satu (1) atau 100%. Adapun rumus perhitungannya, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas PAD

Keterangan	Presentase
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

2.3.4 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi menurut Halim, dalam [9] merupakan rasio yang menggambarkan mengenai kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan pada daerah tersebut. Jadi, semakin besar kontribusi dari PAD, maka akan semakin besar pula kemampuan dari pemerintah daerah tersebut dalam penyelenggaraan desentralisasi. Adapun rumus perhitungannya menurut [9], sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 4. Kriteria Derajat Desentralisasi

Kemampuan Desentralisasi	Rasio Derajat Desentralisasi
Sangat Baik	>50%
Baik	25% - 50%
Kurang Baik	10% - 25%
Tidak Baik	<10%

2.3.5 Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Menurut Mahmudi dalam [11], rasio ini adalah perbandingan dari realisasi dengan anggaran atau target belanja. Rasio efisiensi ini diperuntukkan untuk dapat mengukur mengenai tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Jadi, pemerintah daerah akan dinilai telah melaksanakan efisiensi terhadap anggaran apabila hasil dari rasio efisiensinya <100%. Namun, jika hasilnya >100% dapat menunjukkan telah terjadinya suatu pemborosan anggaran. Adapun rumus untuk menghitung Efisiensi Belanja Daerah [11]:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 5. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
<60	Sangat Efisien

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut penjelasan mengenai hasil dan pembahasan kinerja keuangan kawasan Barlingmascakeb.

3.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kabupaten	Tahun 2020	Pola Hubungan	Tahun 2021	Pola Hubungan	Tahun 2022	Pola Hubungan
Banjarnegara	14,48	Instruktif	18,86	Instruktif	16,42	Instruktif
Purbalingga	20,38	Instruktif	24,07	Instruktif	17,99	Instruktif
Banyumas	26,95	Konsultatif	30,05	Konsultatif	31,77	Konsultatif
Cilacap	25,20	Konsultatif	30,75	Konsultatif	27,32	Konsultatif
Kebumen	18,13	Instruktif	21,24	Instruktif	21,99	Instruktif

Tabel diatas merupakan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu pendapatan asli daerah dibagi dengan pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antardaerah. Nilai dari rasio kemandirian keuangan tertinggi adalah Kabupaten Banyumas sebesar 31,77% pada tahun 2022 yang mana pola hubungannya konsultatif serta

tergolong rendah untuk kemampuan keuangannya. Maksud konsultatif disini, yaitu peran dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang dikarenakan daerah tersebut dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi. Sementara itu untuk yang terendah adalah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020, yaitu sebesar 14,48% dengan pola hubungan instruktif, karena nilainya kurang dari 25% dan tergolong rendah sekali kemampuan keuangannya. Pola hubungan instruktif mempunyai maksud bahwa peran dari pemerintah pusat lebih banyak dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah atau dalam artian daerah tersebut tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Dengan hasil tersebut menandakan jika kawasan Barlingmascakeb secara umum untuk kemandirian keuangannya masih rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif yang mana berarti peran dari pemerintah pusat disini masih lebih banyak perannya.

3.2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 7. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kabupaten	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Banjarnegara	82,65	79,76	84,75
Purbalingga	78,82	76,40	84,13
Banyumas	74,47	72,70	75,58
Cilacap	74,43	72,08	77,84
Kebumen	80,47	78,48	81,82

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, secara keseluruhan semua kabupaten yang ada di kawasan Barlingmascakeb pada tahun 2020 hingga 2022 memiliki rasio lebih dari 50%. Oleh karena itu, merujuk pada kriteria atau ketentuan yang ada jika nilai rasionya lebih dari 50% artinya kabupaten atau daerah tersebut mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keuangan dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

3.3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 8. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Banjarnegara	90,60	109,16	98,31
Purbalingga	110,43	146,30	107,36
Banyumas	91,55	100,93	96,22
Cilacap	95,69	105,23	94,39
Kebumen	96,49	133,18	125,66

Kabupaten Purbalingga sesuai hasil perhitungan dari tabel diatas pada tahun 2020-2022 diatas merupakan satu-satunya kabupaten yang mendapatkan hasil rasio sangat efektif. Hal tersebut karena nilai rasionya melebihi 100%. Selanjutnya Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 dan 2022 juga mendapatkan rasio >100% atau sangat efektif juga. Jadi, secara umum nilai rasio efektivitas PAD di kawasan Barlingmascakeb pada tahun 2020-2022 cukup efektif dan sangat efektif. Dikatakan cukup efektif karena memiliki rasio antara 90-99% dan sangat efektif dikarenakan memiliki rasio sebesar lebih dari 100%. Dengan demikian penggunaan pendapatan asli daerah cukup efektif digunakan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan sebelumnya. Namun, untuk yang masih cukup efektif bisa ditingkatkan lagi dan yang sangat efektif dapat dipertahankan.

3.4 Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 9. Rasio Derajat Desentralisasi

Kabupaten	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Banjarnegara	11,96	15,04	13,92
Purbalingga	16,06	18,39	15,14
Banyumas	20,07	21,85	24,01
Cilacap	18,76	22,17	21,27
Kebumen	14,59	16,67	17,99

Sesuai dengan hasil perhitungan pada tabel diatas, Kawasan Barlingmascakeb pada tahun 2020 hingg 2022 relatif berada di kemampuan kurang baik atau hasil rasio derajat desentralisasinya pada kisaran 10% hingga 25%. Kabupaten Banyumas merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki nilai rasio derajat desentralisasi pada tahun 2020 hingga 2022 lebih dari 20% dan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya pada tahun tersebut.

3.5. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Tabel 10. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Kabupaten	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Banjarnegara	90,33	93,77	93,24
Purbalingga	90,41	99,16	102,16
Banyumas	86,78	88,16	99,75
Cilacap	86,96	91,31	97,10
Kebumen	90,25	98,63	99,32

Secara umum, hasil dari rasio efisiensi berada pada kisaran 80%-90% dan 90%-100% atau cukup efisien dan kurang efisien, kecuali untuk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 nilai rasio efisiensinya 102,16% atau lebih dari 100%. Maka dari itu, pada tahun 2022 Kabupaten Purbalinggan tidak efisien dalam menggunakan anggaran belanjanya.

4. KESIMPULAN

Secara umum, kawasan Barlingmascakeb untuk kemandirian keuangannya masih rendah sekali pada tahun 2020-2022, memiliki pola hubungan instruktif atau dalam artian peran dari pemerintah pusat disini masih lebih banyak jika dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah. Hasil rasio ketergantungan keuangan daerahnya, yaitu Sebagian besar >50% artinya kabupaten atau daerah tersebut memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keuangan dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Secara umum nilai rasio efektivitas PAD di kawasan Barlingmascakeb pada tahun 2020-2022 cukup efektif dan sangat efektif. Kawasan Barlingmascakeb pada tahun 2020 hingga 2022 relatif berada di kemampuan Kurang Baik atau hasil rasio derajat desentralisasinya pada kisaran 10% hingga 25%. Kemudian, hasil dari rasio efisiensi secara umum berada pada kisaran 80%-90% dan 90%-100% atau cukup efisien dan kurang efisien.

REFERENSI

- [1] Anggaran, T., & Pandawa, J. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. 1(1), 40–54.
- [2] Digidowiseiso, K., & Alfian, M. (2023). *Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017- 2021*. 4(1), 247–258.

- [3] Matulatuwa, A., Pelamonia, J. T., & Asrida, W. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Applied Accounting (JAA)*, 3(1), 5–9. <https://journal.isas.or.id/index.php/JAA>
- [4] Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- [5] Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 146–166. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- [6] Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP>
- [7] Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- [8] Siregar, A. O., & S, I. M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. *Image : Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.17509/image.v9i1.23998>
- [9] Digidwiseiso, K., Pujiono, F. A., & ... (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018–2022. *Management Studies and ...*, 4(5), 5929–5938.
- [10] Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 - 2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(2), 1113.
- [11] Lastari, D. dwi ayu, Pratiwi, I. B., Muchlisun, M., Kabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalan Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(09), 19–29.
- [12] Liando, H. S., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value for Money. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 1686–1814. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5938>